

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mobilitas perekonomian suatu negara cerminan dari bagaimana kondisi tata ruang terkecilnya yaitu pertumbuhan ekonomi desa. Dalam menumbuhkan sektor ekonomi, Lembaga Keuangan merupakan badan yang memberikan pengaruh penting di dalamnya. Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 merupakan sebuah kegiatan menarik dana dari masyarakat yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau lembaga kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Berdasarkan dari Undang Undang Pokok Perbankan No. 23 Tahun 1998, jenis lembaga keuangan bank terdiri dari dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan nonbank.

Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank atau Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang aktivitas sama dengan lembaga keuangan bank namun LKBB tidak boleh menerima dana dari masyarakat berupa bentuk giro, tabungan dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank biasanya menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga atau sertifikat deposito dan memberikan kredit sebagai dana investasi perusahaan. Khusus bagi masyarakat pedesaan di Bali telah dibentuk sebuah Lembaga Keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Sesuai Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu lembaga keuangan nonbank yang dibentuk, dikelola, dan dimiliki oleh desa pekraman, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa anggota desa pekraman dengan tujuan mendorong pembangunan perekonomian masyarakat di desa melalui tabungan terarah dan penyaluran kredit. Lembaga Perkreditan Desa ialah sebuah lembaga keuangan non bank yang dasar hukumnya berbeda dengan bank. Badan perkreditan desa dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Bali (PERDA) No. 2 tahun 1998, sedangkan bank menggunakan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai landasan hukum.

Sebuah LPD yang dikelola dengan baik harus menyajikan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya. Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Menurut PSAK No 1 (Revisi 2017) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat kualitas laporan keuangan LPD merupakan hal yang penting sebagai salah satu indikator akan penilaian kinerja. Menurut SAK ETAP Kualitas Laporan Keuangan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami, materialitas dan konservatisme, keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Di lihat dari perkembangan perekonomian di Kecamatan Mengwi yang memiliki potensi di bidang pertanian, pariwisata, dan industri kecil, penting sekali sebuah kelembagaan keuangan seperti LPD dibangun untuk membantu perekonomian masyarakat yang nantinya mampu menjadi dasar untuk menghadapi segala bentuk perubahan yang terjadi. Namun perkembangan suatu LPD tidak terlepas dari suatu permasalahan. Salah satu penyebab dari terjadinya permasalahan di LPD tersebut adalah rendahnya kualitas pelaporan keuangan yang dimiliki.

Dikutip dari artikel melalui artikel *bali.tribunnews.com* lebih dari satu kasus penyimpangan dana LPD di se-Kecamatan Mengwi yang sudah sampai pengadilan seperti kasus pada LPD Desa Adat Kapal (2019) dimana Majelis Hakim Pengadilan tipikor Denpasar menetapkan 5 tersangka perempuan adalah mantan kolektor LPD Desa Adat Kapal. Karena melakukan kecurangan yaitu membuat slip penarikan tabungan yang seolah-olah dibuat seperti keinginan nasabah. Akan tetapi kenyataannya semua itu digunakan para tersangka untuk mengelabui laporan keuangan LPD Desa Adat. Pada kasus tersebut, mengakibatkan kerugian perekonomian negara dengan jumlah sebesar yakni Rp 15.352.059.425 (<https://bali.tribunnews.com>).

Selain kasus LPD Desa Adat Kapal, pada awal tahun 2022 Polres Badung telah menetapkan I Ketut Rai Darta, ketua LPD Desa Adat Gulingan sebagai tersangka korupsi mengakibatkan kerugian mencapai Rp 30.000.000.000, karena ditemukan adanya kredit fiktif yang dibuat oleh RD dan adanya deposito yang dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah, dan ditemukannya perbedaan antara daftar nominatif pinjaman yang ada pada sistem dengan yang ada di neraca laporan

keuangan. Hal ini membuat laporan keuangan yang disajikan tidak *reliable* (<https://radarbali.jawapos.com>). Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa sangat penting bagi LPD untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pemahaman akuntansi. Menurut Mahmudi (2010:124) Pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pemahaman tentang akuntansi. Pekerjaan akuntansi seharusnya memahami pelaksanaan proses akuntansi hingga menjadi laporan keuangan dengan berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan SAK ETAP dan standar ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Laporan keuangan pada LPD di Bali penyusunannya dilakukan berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. LPD sebagai Lembaga Komunitas milik desa adat lebih memilih untuk menerapkan SAK ETAP dikarenakan isi didalam standar akuntansi ini lebih ringkas serta poin-poin yang dijabarkan lebih ringan, lebih jelas dengan Bahasa yang lebih mudah dimengerti. Hasil penelitian Yanti (2019), Pramesti (2021), Suandewi (2022), Andari (2022), Damayanti (2023) menyatakan bahwa

tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Pratiwi (2021) dan Pebriantari (2021) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pendidikan. Menurut Depdiknas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau yang sering disebut jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat Pendidikan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan berarti memiliki moralitas yang tinggi, dimana perilaku seseorang yang berpendidikan jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan.

Pola pikir seseorang yang berpendidikan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Seorang penyaji laporan keuangan yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi akan lebih baik dalam mengelola sebuah laporan keuangan dibandingkan dengan yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, keputusan yang nantinya akan diambil untuk membuat laporan keuangan akan lebih baik karena dikelola oleh seorang penyaji keuangan yang paham dibidang ekonomi. Hasil penelitian Lohanda (2017), Sukarini & Dewi (2018), Pramesti (2021) menyatakan tingkat pendidikan

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Devi (2019), Jhon (2016) dan Damayanti (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Profesionalisme juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah profesionalisme. Menurut Hornby (2002:677), *Professionalisme is mark or qualities of profession* artinya Profesionalisme adalah nilai atau kualitas dari sebuah profesi. Sebagai dasar penguat pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:789) dijelaskan bahwa profesionalisme merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu sehingga mempunyai kompetensi. Profesionalisme sendiri diambil dari kata dasar “profesional” di mana seseorang atau karyawan tentu saja harus memahami arti kata profesional dalam melakukan suatu pekerjaan di dalam lingkup kerja.

Seseorang yang bekerja secara profesional cenderung memiliki motivasi yang kuat dan selalu berpedoman pada etika. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang profesional akan terlaksana dengan cermat, sehingga output yang dihasilkan juga berkualitas. Sikap profesionalisme sangat diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan, dengan sikap profesionalisme berarti seorang yang membuat laporan keuangan telah menggunakan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga laporan keuangan yang dibuat memiliki kualitas yang tinggi. Hasil penelitian Basar (2017) Sari (2021), Pratiwi (2021) dan Damayanti (2023) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil tersebut bertolakbelakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019) yang menemukan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang berharga yang dituntut menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Menurut Susanto (2017:13) kualitas sistem informasi akuntansi merupakan efektifitas yang berkaitan dengan relevansi suatu informasi akuntansi yang termasuk didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten dapat digunakan dan lengkap.

Jika kualitas sistem informasi baik, maka akan semakin baik juga kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan, sebaliknya jika kualitas sistem informasi rendah, maka akan semakin rendah juga kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian Suari (2019), Wati (2021), Dewi (2022) menjelaskan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap penyajian informasi laporan keuangan. Namun lain halnya dengan penelitian Dewi (2019) dan Damayanti (2023) yang mampu membuktikan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Rustam (2017:294) definisi *Good Corporate Governance* adalah serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. GCG menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menjalankan

kegiatan usaha, memerhatikan kebutuhan *stakeholder* dan memastikan perusahaan beroperasi secara sehat, aman dan mematuhi perlindungan hukum. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri hingga secara otomatis meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kualitas laporan keuangan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian Yadiati dkk (2021) Gea dkk (2022) Pramesti dkk (2022) diperoleh hasil bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Sedangkan hasil penelitian Andrian & Ashari (2022) *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kasus dan hasil penelitian sebelumnya yang beragam dan tidak konsisten (*research gap*) dan kasus kualitas laporan keuangan yang dilihat dari kondisi LPD yang mana dalam pengembangannya belum sesuai dengan harapan, sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai kualitas laporan keuangan, dengan mengambil variabel tingkat pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, kualitas sistem informasi akuntansi, dan *good corporate governance*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) yang berada di Kecamatan Mengwi, agar nantinya LPD lain yang ada di Kecamatan Mengwi dapat menanggulangi munculnya kasus yang serupa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
- 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
- 3) Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
- 4) Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi?
- 5) Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.

- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Mengwi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

##### 1) Bagi Mahasiswa

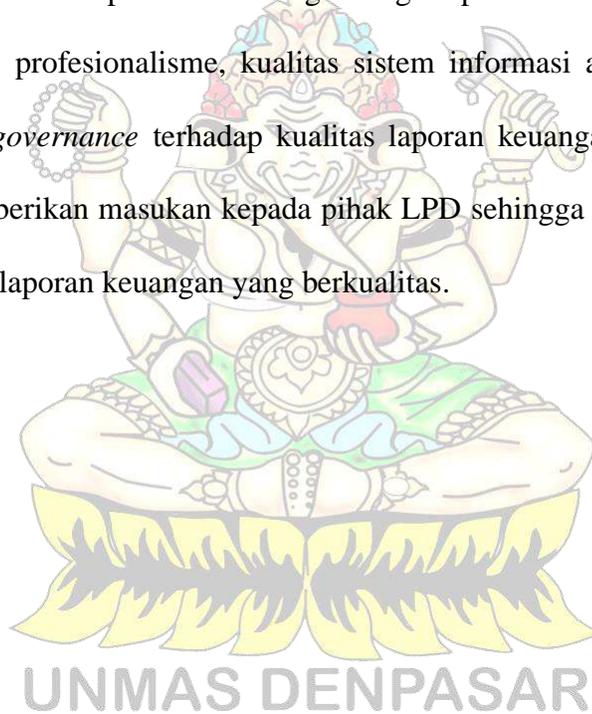
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa didalam mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan khususnya bidang akuntansi, salah satunya mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, kualitas sistem informasi akuntansi, dan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD di Kecamatan Mengwi. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi di penelitian selanjutnya.

## 2) **Bagi Fakultas dan Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi tambahan dan dapat melengkapi kebutuhan perpustakaan yang nantinya dapat dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

## 3) **Bagi Perusahaan**

Peneliti berharap supaya penelitian ini bisa memberikan masukan bagi LPD serta memberikan opini terkait dengan tingkat pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, kualitas sistem informasi akuntansi, dan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD. Serta dapat memberikan masukan kepada pihak LPD sehingga dapat meningkatkan pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling, (1976:360), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih dalam sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Menurut Bastian (2006:213) teori Agensi (*agency theory*), atau yang sering disebut juga *contracting theory*, merupakan salah satu kebutuhan riset akuntansi terpenting saat ini.

Menurut Anthony (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Semakin besar perusahaan maka akan terjadi pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan. Pemegang saham bertindak sebagai pemilik dan manajemen bertindak sebagai pengendali perusahaan. Pemisahan peran ini terjadi karena pemegang saham tidak dapat lagi mengikuti kegiatan perusahaan setiap hari. Banyak pemegang saham yang

bertindak pasif artinya tidak ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan, oleh karena itu manajer diharapkan dapat bertindak demi kepentingan saham.

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan perusahaan sebagai titik temu antara prinsipal dengan agen. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan pemegang saham perusahaan karena pihak manajemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Penyampaian laporan keuangan dapat meminimalisir asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham, karena laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal dari perusahaan.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing karyawan lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak Desa

Adat (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan LPD dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan karyawan (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan yang masing-masing ingin mempertahankan dan mencapai kemakmuran atau keuntungan yang dikehendaki.

Desa Adat (*principal*) bisa melakukan kebijakan yang hanya mementingkan LPD dan mengorbankan kepentingan karyawan (*agent*). Untuk mengurangi konflik maka perlu dilakukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Menurut Jensen & Meckling (1976) Monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya pengawasan (*monitoring cost*) berupa biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost*. Biaya pengawasan (*monitoring cost*) biaya untuk mengawasi perilaku agen apakah agen telah bertindak sesuai kepentingan principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer.

Dalam penelitian ini, informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus LPD selaku pihak agen dijadikan sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota LPD, dan desa pekraman sebagai prinsipal yang dananya dikelola. Laporan keuangan sebagai sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan LPD. Kualitas laporan keuangan menjadi hal yang diutamakan dalam rangka menjaga

kepercayaan prinsipal. Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena karyawan sebagai (*agent*) harus bisa mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang telah dibuatnya untuk menghindari terjadinya manipulasi laporan keuangan. Dengan pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, sikap profesionalismenya dan sistem informasi akuntansi yang berkualitas, serta penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pembuatan laporan keuangan agar memberikan informasi yang akurat terhadap pihak prinsipal.

### **2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa**

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985. Menurut Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988, LPD adalah suatu nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan. Peraturan Gubernur Bali No. 11 Tahun 2013 pasal 1, menyebutkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa Pakraman.

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Raperda tentang Lembaga Perkreditan Desa menjadi perda berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Bali No 12 Tahun 2017 disana disebutkan sebagai lembaga perekonomian milik desa pekraman, LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi bagi pembangunan desa pekraman dan dijelaskan pula bahwa LPD adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa,

dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa atas dasar pertimbangan bahwa:

1. Desa Pekraman merupakan lembaga tradisional yang lebih mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama karena pekramannya (warga desa pekraman).
2. Desa Pekraman mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati dan dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Desa Pekraman merupakan suatu lembaga tradisional dan bersifat kelompok yang didasarkan kepada geografis pekraman.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No 3 Tahun 2017 tercantum fungsi dan tujuan dari LPD, antara lain :

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
2. Memberantas gadai gelap dan sejenisnya.
3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
4. Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada krama desa dan di dalam melaksanakan dan mengelola LPD pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional lembaga. Pasal 7 Peraturan Provinsi Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD sebagai berikut:

1. Menerima dan menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberi pinjaman kepada krama desa dan desa.
3. LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain dengan syarat ada kerjasama antara desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
4. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atas bantuan dana.
5. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa pakraman. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa keuangan bank. LPD menggunakan dasar pengakuan accrual basis yang merujuk SAK ETAP.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan**

Definisi kualitas menurut Mulyana (2010: 96) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berdasarkan kadar ketidaksesuaian, dan dapat dicapai melalui pemeriksaan. Menurut Bastian (2006: 9) pengertian dari kualitas laporan keuangan adalah kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari

proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Jonas dan Balanchett dalam Amin (2019:156) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dapat dipahami serta dirancang tidak menyesatkan kepada penggunaannya.

Kualitas laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses akuntansi atau merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang dan modal yang terjadi dalam sebuah perusahaan serta laba ruginya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012: 5) tertuang dalam PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Saat ini LPD menggunakan SAK ETAP sebagai standar untuk menyediakan laporan keuangan. SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan pasti tidak akan menyulitkan bagi penggunaannya

Dalam perlakuan pengaturan SAK-ETAP ini didasarkan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan entitas, meliputi:

1. Neraca dalam perlakuan akuntansi ini memuat beberapa pos-pos seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha, aset serta kewajiban, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Dalam pengklasifikasian SAK ini diatur ke dalam SAK Umum baik aset dan kewajiban.
2. Laporan laba rugi memiliki pos-pos seperti pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi investasi, beban pajak, dan laba rugi bersih. SAK-ETAP tidak berkenan dalam penyajian dan pengungkapan pos luar biasa. Entitas dianjurkan menyajikan analisis beban berdasar sifat atau fungsi beban analisis.
3. Laporan perubahan posisi keuangan memiliki pos-pos seperti laba rugi entitas suatu periode, pendapatan serta beban yang diakui langsung, komponen ekuitas yang berpegaruh kebijakan serta koreksi, dan komponen ekuitas yang rekonsiliasi jumlahnya tercatat awal serta akhir.
4. Laporan arus kas menyajikan informasi historis kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah dua hal yang berbeda. Kas adalah kas di bank. Sedangkan, setara kas adalah investasi jangka pendek yang tidak memiliki tujuan investasi. Dalam laporan arus kas ini memiliki tiga aktivitas yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan memiliki informasi yang dimuat seperti dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Informasi lainnya seperti disyaratkan dalam SAK-ETAP tapi tidak disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tambahan yang tidak

disajikan dalam laporan keuangan tapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

#### 2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi

*American Accounting Association* dalam Soemarso (2018: 5) mendefinisikan Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Mahmudi (2010:124) Pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Menurut Maryam (2020:150) tingkat pemahaman akuntansi dapat terlihat dari seberapa menguasai atau paham seseorang terhadap ilmu akuntansi yang dipelajari.

Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang yang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah orang yang mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali penyusunannya berdasarkan SAK ETAP. LPD sebagai Lembaga Komunitas milik desa adat lebih memilih untuk menerapkan SAK ETAP karena isi didalam standar akuntansi ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum PSAK.

Laporan Keuangan pada LPD di Bali penyusunannya dilakukan berdasarkan SAK ETAP. Menurut IAI (2018) Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP sebagai berikut:

Laporan Keuangan Lengkap merupakan Laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi; Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  - a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Konsep dasar pemahaman akuntansi terdiri dari tiga bagian yaitu aktiva, hutang dan modal sebagai berikut :

1. Aktiva dalam pengertiannya merupakan aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya misalnya hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya.
2. Hutang merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur.

3. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), dan laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan akan lebih baik dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang akuntansi. Jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan, serta akan menghambat penyusunan laporan keuangan.

#### **2.1.5 Tingkat Pendidikan**

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembang potensi dan kreatifitas peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Makna pendidikan terletak pada bagaimana kualitas sumber daya manusia senantiasa melestarikan nilai-nilai luhur sosial dan budaya yang telah member bukti sebagai perjalanan suatu sejarah bangsa

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Selanjutnya, Menurut Hasbullah (2008:28) pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

1. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar yang mengutamakan perluasan dan peningkatan ketrampilan siswa. Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan berketerampilan. Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya serta penataan kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup dalam masyarakat.
3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan 177 oleh Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi di sini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Indikator keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi pendidikan yang didapat maka akan semakin tinggi pula pengetahuan dan intelektual seseorang. Dengan adanya pendidikan formal yang memadai, staf bagian keuangan atau akuntansi akan lebih mudah untuk memahami pekerjaan yang harus dilakukan.

### 2.1.6 Profesionalisme

Menurut Oerip dan Uetomo (2000:264-265) seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Menurut Kurniawan (2005:74) Profesionalisme artinya keahlian dan kemampuan seseorang merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi. Menurut Harefa (2004:137) bahwa profesionalisme pertamanya adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambing prestasi kerja.

Profesionalisme sendiri diambil dari kata dasar profesional di mana seseorang atau karyawan tentu saja harus memahami arti kata profesional dalam melakukan suatu pekerjaan di dalam lingkup kerja. Seseorang yang bekerja secara profesional cenderung memiliki motivasi yang kuat dan selalu berpedoman pada etika. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang profesional akan terlaksana dengan cermat, sehingga output yang dihasilkan juga berkualitas.

Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan dan latihan yang khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. *Accounting* yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan mengetahui tugasnya sebagai seorang *accounting*, sehingga *accounting* tersebut akan menggunakan kemampuannya secara maksimal serta melaksanakan tugasnya dengan jujur,

bersungguh-sungguh, dan penuh rasa tanggung jawab. Kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas sesuai dengan bidang dan tingkatannya masing-masing dapat didefinisikan sebagai kompetensi. Laporan keuangan membutuhkan profesionalisme tingkat tinggi. Karena konotasi profesionalnya produk ini berkualitas tinggi. Untuk memastikan laporan keuangan memiliki kualitas terbaik, penyusun laporan keuangan menyediakan kapasitas dan melaksanakan tugas mereka dengan semaksimal mungkin.

### **2.1.7 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi**

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah kualitas sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada *input*, proses dan *output* yang baik. Penyusunan laporan yang berkualitas memerlukan penerapan sistem informasi yang berkualitas diantaranya yaitu fleksibel, efisien, mudah diakses dan tepat waktu.

Susanto (2008:72) mengatakan sistem informasi akuntansi merupakan harmonisasinya integrasi perangkat keras, perangkat lunak, *brainware*, prosedur, jaringan telekomunikasi dan data base yang terintegrasi. Menurut Gelinas (2012:18) Sistem informasi berfungsi penting dalam organisasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi dan untuk mendukung kegiatan manajerial termasuk pengambilan keputusan manajemen. Sacer *et al* (2006:62) menyatakan tanpa kualitas sistem informasi, tidak akan ada kualitas informasi akuntansi. Menurut Wijayanto (2014:4) pada saat penyusunan laporan keuangan

yang berkualitas maka diperlukan juga kualitas dari sistem informasi akuntansi tersebut karena itu akan mempengaruhi laporan keuangan yang berkualitas adalah fleksibel, efisien, mudah diakses dan tepat waktu. Jadi dengan adanya kualitas sistem informasi akuntansi yang baik akan memudahkan karyawan dalam penyusunan laporan keuangan dan dalam mengoperasikan sistem tersebut sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut SAK-ETAP terdapat beberapa karakteristik kualifikasi informasi dalam laporan keuangan yang tertuang sebagai berikut:

1. Dapat dipahami, artinya memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis.
2. Relevan, mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu.
3. Materialitas, mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil.
4. Keandalan, bisa bebas dari kesalahan material dan bias.
5. Substansi mengungguli bentuk artinya mampu meningkatkan keandalan laporan keuangan.
6. Pertimbangan Sehat artinya mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan.
7. Kelengkapan artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap.
8. Dapat Dibandingkan artinya bisa membandingkan antarperiode indentifikasi tren.
9. Tepat Waktu artinya disediakan dalam jangka waktu pengambilan.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat artinya harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

### **2.1.8 Good Corporate Governance**

Menurut Zarkasyi (2018:36) *Good corporate governance* merupakan suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. OECD (*organisation for economic cooperation and development* (2004) dan FCGI (*Forum for corporate governance* di Indonesia (2001) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Definisi *corporate governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan

jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Awalnya istilah tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal sebagai *good corporate governance* (GCG) populer tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Untuk mengatasinya, pemerintah AS bertindak cepat dengan mengeluarkan UU untuk meredam kepanikan para investor. UU ini menjelaskan penataan kembali akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, UU ini menjadi acuan dalam menjabarkan dan menegakkan GCG, baik di AS maupun di Indonesia.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang dan digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. *Good corporate governance* adalah sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Jika penerapan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* belum maksimal maka tidak akan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik seperti belum terciptanya hubungan yang baik antar masyarakat serta belum transparansi dalam menyampaikan laporan keuangan. Prinsip-prinsip dari *good corporate governance* adalah keterbukaan

(transparansi), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (independensi) dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip *good corporate governance* wajib diterapkan oleh LPD untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu krama desa dan antara pengelola LPD dengan kreditur yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri. *Good corporate governance* berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap LPD itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dari perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada laporan keuangan.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti yang meneliti tentang tingkat pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, kualitas sistem informasi akuntansi dan *good corporate governance*. Berbagai penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan penambahan variabel maupun dengan mengurangi variabelnya, berikut merupakan beberapa jenis penelitian sebelumnya:

Yang pertama jurnal acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2023) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Pendidikan,

Profesionalisme, Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Gianyar”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah tingkat pemahaman akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, fungsi badan pengawas sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas pelaporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Gianyar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Gianyar. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, diperoleh 95 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kualitas sistem informasi akuntansi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas pelaporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar, sedangkan tingkat pemahaman akuntansi, profesionalisme dan fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi *et al* (2016) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan, Motivasi Kerja dan Kematangan Usia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Koperasi Pegawai Negeri di Kota Singaraja). Variabel independen pada penelitian tersebut adalah pendidikan, motivasi kerja dan kematangan usia sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan (studi empiris pada koperasi pegawai negeri di Kota Singaraja). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah pendidikan tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri di Kota Singaraja, sedangkan motivasi kerja berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri di Kota Singaraja dan kematangan usia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai negeri di Kota Singaraja.

Penelitian yang dilakukan oleh Basar (2017) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah profesionalisme berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Penelitian yang dilakukan oleh Lohanda & Mustikawati (2018) berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan UMKM

berdasarkan SAK ETAP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP dan pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukarini & Dewi (2018) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES di Kecamatan Negara”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara, pengalaman kerja berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara, pelatihan berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019) yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Profesionalisme, Fungsi Badan Pengawas, dan Tingkat

Pemahaman Akutansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan, profesionalisme, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akutansi sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung dan tingkat pemahaman akutansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung sedangkan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Badung.

Penelitian yang dilakukan oleh Suari *et al* (2019) yang berjudul “Kualitas Pelaporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Gianyar, Bali”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akutansi sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar, fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar, sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar,

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2019) yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada PT. Raditya Dewata Perkasa”. Variabel independen penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi sedangkan variabel dependen penelitian tersebut adalah Kualitas Pelaporan Keuangan Pada PT. Raditya Dewata Perkasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut diperoleh bukti empiris bahwa etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada PT. Raditya Dewata Perkasa, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada PT. Raditya Dewata Perkasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi *et al* (2021) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Profesionalisme, Dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD”. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, profesionalisme, dan etika

kepemimpinan sedangkan variabel dependen penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Marga. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga LPD di Kecamatan Marga.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti *et al* (2021) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa”. Penelitian ini dilakukan pada lembaga perkreditan desa di kecamatan tampaksiring. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan *good corporate governance*. Sedangkan variabel dependen penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel Tingkat Pemahaman Akuntansi (TPA) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan serta variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pebriantari (2021) yang berjudul “Pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan

teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada LPD se-Kecamatan Gianyar)”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi sedangkan variabel dependen penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan (studi empiris pada LPD se-Kecamatan Gianyar). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu fungsi badan pengawas dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al* (2021) yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Audit Internal, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan, audit internal, kualitas sistem informasi akuntansi, dan tingkat pemahaman akuntansi sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari 2021 yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan badan usaha milik desa di Kecamatan Sawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan badan usaha milik desa di Kecamatan Sawan, kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan badan usaha milik desa di Kecamatan Sawan, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan badan usaha milik desa di Kecamatan Sawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti 2021 yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Akutansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akutansi sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten

Badung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Penelitian yang dilakukan oleh Suandewi (2022) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Pengalaman kerja Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Blahbatuh. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah tingkat pemahaman akuntansi, pengalamankerja dan budaya tri hita karana sedangkan variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa. Teknik analisis daya yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi, pengalaman kerja dan pawongan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan parhyangan dan palemahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andari (2022) yang berjudul “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh”. Variabel independen penelitian tersebut adalah etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi, dan budaya organisasi sedangkan variabel dependen penelitian tersebut adalah kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan sedangkan etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrian & Ashari (2022) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Pati)”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan disiplin kerja sedangkan variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kualitas laporan keuangan (studi empiris pada bank perkreditan rakyat Di Kabupaten Pati). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada bank perkreditan rakyat Di Kabupaten Pati, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada bank perkreditan rakyat Di Kabupaten Pati, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada bank perkreditan rakyat Di Kabupaten Pati, disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pada bank perkreditan rakyat Di Kabupaten Pati.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu tingkat pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, kualitas sistem informasi akuntansi, dan *good corporate governance*. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kualitas laporan keuangan. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian dimana penelitian ini mengambil objek LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dengan lokasi penelitian yang dipilih di LPD Kecamatan Mengwi pada Tahun 2023, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek yang beragam dengan lokasi yang berbeda-beda dan tahun penelitian yang berbeda juga.